

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kerangka perekonomian suatu negara terdiri dari dua sektor yakni sektor riil dan sektor keuangan. Sektor keuangan memainkan peran penting dalam perekonomian, khususnya dalam menyediakan dana untuk investasi dan pembiayaan ekonomi secara keseluruhan. Sektor ini secara efektif memobilisasi tabungan dan menawarkan kepada peminjam berbagai produk keuangan berkualitas tinggi serta berisiko rendah. Menurut DFID (*Department for International Development*) sebagaimana dikutip dalam Indrakusuma & Hayati (2020) sektor keuangan mencakup perusahaan besar dan kecil, serta lembaga formal dan informal yang memberikan layanan keuangan kepada konsumen, bisnis, dan entitas keuangan lainnya. Secara lebih luas, sektor ini mencakup semua aspek perbankan, pasar saham, asuransi, koperasi kredit, entitas keuangan mikro, dan pemberi pinjaman uang.

Pendalaman keuangan berfungsi sebagai standar untuk menilai peran sektor keuangan dalam perekonomian. Konsep ini mengacu pada peningkatan ukuran dan efisiensi sektor keuangan suatu negara dan sangat penting karena dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut data International Monetary Fund (IMF, 2020), indeks pembangunan keuangan mengevaluasi lembaga dan pasar keuangan berdasarkan tiga dimensi utama: kedalaman, akses, dan efisiensi. Pendalaman keuangan secara khusus berkaitan dengan aspek kedalaman indeks ini. Sebagaimana didefinisikan oleh World Bank, (2016), dimensi kedalaman mencakup faktor-faktor seperti M2, kredit sektor swasta, aset lembaga keuangan, simpanan, dan nilai tambah bruto oleh sektor keuangan dalam kaitannya dengan produk domestik bruto. Variabel ekonomi makro yang umum diamati dalam dimensi kedalaman ini adalah Pasokan Uang secara luas, yang disebut sebagai M2.

Mukhlis berpendapat bahwa pendalaman keuangan (*financial deepening*) tercermin dalam rasio aset sektor keuangan terhadap PDB (Hanna, 2017). Peningkatan rasio yang lebih kecil menandakan sektor keuangan yang lebih lemah di suatu negara, sedangkan rasio yang lebih besar menunjukkan kapasitas sektor keuangan yang lebih kuat untuk menyalurkan dana dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pendalaman keuangan yang lebih besar mengarah pada peningkatan sirkulasi uang dalam perekonomian dan peran yang lebih menonjol bagi lembaga keuangan dan pasar uang. Sebagai negara berkembang, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina masing-masing memiliki kondisi keuangan yang berbeda, oleh karena itu, tidak dapat mengadopsi sistem dan kebijakan yang seragam.

Rasio pendalaman keuangan dihitung dengan membagi uang beredar luas, atau M2, dengan PDB. Oleh karena itu, peran penting lembaga keuangan dalam memengaruhi pasokan uang sebagai sumber pendanaan merupakan faktor penting dalam keberhasilan pendalaman keuangan. Sirkulasi uang yang lebih besar dalam masyarakat meningkatkan prospek pendalaman keuangan yang efektif (Pulungan & Yustika, 2012).

Pendalaman keuangan suatu negara akan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mengarahkan sumber daya secara efektif ke sektor-sektor yang menjanjikan, mengurangi risiko melalui berbagai produk keuangan, meningkatkan jumlah faktor produksi atau penggunaannya yang efisien, dan meningkatkan tingkat investasi atau produktivitas marjinal akumulasi modal dengan dana yang dimanfaatkan dengan lebih baik. Agar ekonomi dapat berkembang dan tetap kuat, diperlukan sistem keuangan yang secara efisien mentransfer dana dari mereka yang memiliki kelebihan sumber daya kepada mereka yang memiliki peluang investasi yang berharga (Mishkin, 2008).

Bagaimana peran sektor keuangan dalam menciptakan Produk Domestik Bruto (PDB) telah dibahas dalam berbagai teori pertumbuhan ekonomi. Beberapa teori populer disebutkan oleh Harrod Domar dan Solow. Teori pertumbuhan Solow menggambarkan tiga komponen fundamental pertumbuhan ekonomi: modal (K), tenaga kerja (L), dan teknologi (T) (Lutfiana, 2020).

Industri perbankan memegang peranan penting dalam perolehan modal. Caranya adalah melalui fungsi intermediasi keuangan, yang mempertemukan unit-unit yang kelebihan pengeluaran dan unit-unit yang kekurangan pengeluaran. Sektor keuangan di ASEAN memegang peranan yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan integrasi regional. ASEAN merupakan salah satu kawasan dengan pertumbuhan ekonomi paling dinamis dan integrasi ekonomi yang semakin erat. Jumlah penduduk ASEAN yang besar dan mayoritas berusia muda menjadi pasar potensial bagi jasa keuangan. Dalam mendorong *financial deepening* negara-negara di ASEAN juga menghadapi beberapa tantangan seperti infrastruktur yang belum memadai, tingkat inklusi keuangan yang rendah, dan risiko sistematis. Sehingga tingkat *financial deepening* di antara negara-negara ASEAN masih bervariasi.

Produk Domestik Bruto digunakan untuk menjadi salah satu indikator yang dapat mendorong peningkatan *financial deepening*, pada dasarnya nilai produk domestik bruto yang tinggi akan menjadikan nilai *financial deepening* yang tinggi pula. Namun faktanya menyatakan bahwa nilai produk domestik bruto yang tinggi tidak menjadikan peningkatan pada *financial deepening* contohnya seperti negara Indonesia. Begitu pula pada negara Malaysia dan Singapura yang memiliki pola berlawanan dengan Indonesia, negara tersebut memiliki nilai *financial deepening* meskipun memiliki nilai produk domestik bruto yang rendah. Gambar 1.1 menunjukkan perbandingan antara Produk Domestik Bruto di enam negara di ASEAN.

Tabel 1.1 Produk Domestik Bruto di ASEAN 6 Tahun 2021-2023 (US\$)

Wilayah	Tahun		
	2021	2022	2023
INDONESIA	1.186.509.691.071	1.319.076.267.292	1.371.171.152.331
MALAYSIA	373.784.823.673	407.605.841.348	399.705.169.319
PHILIPINA	394.087.359.848	404.353.369.605	437.146.372.730
SINGAPURA	434.111.559.283	498.474.540.988	501.427.500.080
THAILAND	506.256.494.298	495.645.210.973	514.968.699.239
VIETNAM	366.474.752.771	410.324.028.883	429.716.969.044

Sumber : World Bank, 2024

Berdasarkan Tabel 1.1 PDB di enam negara di ASEAN mengalami Peningkatan setiap tahunnya. Namun hal ini tidak selalu menjadikan rasio uang beredar luas terhadap PDB juga mengalami peningkatan, hal ini disebabkan dengan perubahan jumlah uang beredar pada masing-masing negara. Gambar 1.2 menunjukkan perbandingan antara Rasio Uang Beredar Luas terhadap PDB di enam negara di ASEAN.

Tabel 1.2 Uang Beredar Luas (% of PDB) di ASEAN 6 Tahun 2021-2023 (%)

Wilayah	Tahun		
	2021	2022	2023
INDONESIA	46,36	43,54	42,25
MALAYSIA	132,53	119,17	123,96
PHILIPINA	90,37	85,86	83,60
SINGAPURA	164,71*	147,25*	148,97*
THAILAND	148,63	143,83	142,19
VIETNAM	146,16	137,29	156,97

Sumber : World Bank, 2024

Keterangan * : data diolah, 2025.

Berdasarkan Tabel 1.2 Rasio Uang Beredar Luas terhadap PDB di enam negara di ASEAN mengalami Peningkatan ataupun penurunan setiap tahunnya. Pada umumnya, perkembangan Rasio Uang Beredar Luas terhadap PDB dapat dipengaruhi oleh kebijakan moneter, stabilitas ekonomi seperti keterbukaan perdagangan. *International Monetary Fund* (IMF) mendefinisikan keterbukaan perdagangan sebagai kebebasan berdagang dengan negara lain yang dijadikan sebagai cara untuk meningkatkan efisiensi dalam alokasi sumber daya dan pertumbuhan ekonomi.

Nilai keterbukaan perdagangan negara-negara di ASEAN sejalan dengan nilai *financial deepening* negara-negara di ASEAN. Singapura yang memiliki nilai *financial deepening* tertinggi memiliki nilai keterbukaan tertinggi pula diikuti oleh negara Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, dan Indonesia. Hal ini berarti bahwa peningkatan nilai keterbukaan perdagangan suatu negara akan meningkatkan nilai *financial deepening* negara tersebut.

Tabel 1.3 Keterbukaan Perdagangan di ASEAN 6 Tahun 2021-2023 (%)

Wilayah	Tahun		
	2021	2022	2023
INDONESIA	40,20	45,47	41,32
MALAYSIA	134,04	146,51	132,06
PHILIPINA	63,48	72,43	67,40
SINGAPURA	329,78	332,98	311,24
THAILAND	117,14	132,86	129,14
VIETNAM	186,68	183,79	166,32

Sumber : World Bank, 2024

Berdasarkan Tabel 1.3 Keterbukaan Perdagangan setiap negara di ASEAN berbeda-beda. Keterbukaan Perdagangan dilihat dari Rasio Ekspor serta Impor Terhadap PDB. Negara yang memiliki persentase keterbukaan perdagangan paling tinggi selama periode 2021- 2023, yaitu Singapura. Menurut Milton Friedman, keterbukaan perdagangan yang tinggi dapat meningkatkan jumlah uang beredar luas karena meningkatnya ekspor, arus modal, aktivitas ekonomi dan investasi asing. sebaliknya rendahnya keterbukaan perdagangan mengakibatkan berkurangnya jumlah uang beredar luas di masyarakat. Hal tersebut menimbulkan spekulasi apakah semakin tinggi persentase keterbukaan perdagangan juga akan berpeluang meningkatkan jumlah uang beredar luas di negara-negara ASEAN. Selain Keterbukaan Perdagangan, Jumlah uang beredar luas juga dipengaruhi oleh tingkat inflasi. Inflasi merupakan peningkatan harga umum yang terus menerus dan tidak terkendali, yang dapat menyebabkan kerugian bagi masyarakat (Blinder, 1997).

Tabel 1.4 Inflasi di ASEAN 6 Tahun 2021-2023 (%)

Wilayah	Tahun		
	2021	2022	2023
INDONESIA	1,56	4,21	3,67
MALAYSIA	2,48	3,38	2,49
PHILIPINA	3,93	5,82	5,98
SINGAPURA	2,31	6,12	4,82
THAILAND	1,23	6,08	1,23
VIETNAM	1,83	3,16	3,25

Sumber : World Bank, 2024

Berdasarkan Tabel 1.4 Inflasi di setiap negara di ASEAN kenaikan dari tahun 2021-2022 dan mengalami penurunan pada 2022-2023. Menurut Milton Friedman, inflasi yang tinggi dapat meningkatkan jumlah uang beredar luas karena meningkatnya permintaan dan penawaran uang. sebaliknya rendahnya inflasi mengakibatkan berkurangnya jumlah uang beredar luas di masyarakat. Joseph Stilitz berpendapat bahwa inflasi yang tinggi dapat meningkatkan jumlah uang beredar luas karena meningkatnya kecepatan perputaran uang dan penawaran uang.

Suku Bunga Rill juga menjadi salah satu indikator yang mempengaruhi jumlah uang beredar luas. Suku bunga rill adalah suku bunga yang disesuaikan dengan inflasi, sehingga menghilangkan efek inflasi pada suku bunga dan mencerminkan biaya pinjaman yang sebenarnya (Mankiw, 2007). Menurut Michael Parkin (2008) suku bunga rill adalah suku bunga yang mencerminkan biaya pinjaman sebenarnya, setelah disesuaikan dengan inflasi dan resiko kredit. Suku bunga rill adalah persentase dari pokok utang yang dibayar sebagai imbal jasa atau bunga dalam suatu periode tertentu. Dalam dunia perbankan, suku bunga rill merupakan persentase pokok pinjaman nasabah yang dibayarkan sebagai imbal jasa atau bunga kepada pihak bank.

Tabel 1.5 Suku Bunga Rill di ASEAN 6 Tahun 2021-2023 (%)

Wilayah	Tahun		
	2021	2022	2023
INDONESIA	2,75	-0,96	7,28
MALAYSIA	-2,14	-2,38	7,32
PHILIPINA	4,00	5,00	5,00
SINGAPURA	-4,55	3,00	4,00
THAILAND	1,27	-1,55	3,03
VIETNAM	4,79	3,81	7,28

Sumber : World Bank, 2024

Berdasarkan Tabel 1.5 menunjukkan bahwa suku bunga rill di enam negara di ASEAN mengalami kenaikan selama periode 2020-2023. Meskipun demikian, suku bunga rill memiliki hubungan yang negatif terhadap jumlah uang beredar luas. Menurut Freidman suku bunga rill yang tinggi dapat mengurangi jumlah uang

beredar luas dimasyarakat karena dapat meningkatkan biaya pinjaman dan kemampuan menabung masyarakat. Sebagaimana berbagai macam temuan pada penelitian terkait *Financial Deepening* dalam penelitian (Hanna, 2017) mengatakan bahwa di Jawa dan Sumatera, faktor suku bunga riil, inflasi, dan pendapatan per kapita memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendalaman keuangan. Berdasarkan hasil penelitian (Millah, 2021) perkembangan keuangan dan pertumbuhan ekonomi berkorelasi positif.

Dalam upaya mengatasi masalah kesenjangan dalam pendalaman keuangan, khususnya Rasio Pasokan Uang Luas terhadap PDB telah menjadi cukup luas dalam berbagai literatur. Seperti diketahui, setiap negara ASEAN memiliki PDB, keterbukaan perdagangan, inflasi, dan suku bunga riil yang sangat berbeda. Oleh karena itu penelitian ini sangat relevan dan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan moneter dan fiskal yang lebih baik di Kawasan ASEAN. Maka dari itu berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang “**Determinan *Financial Deepening* di ASEAN 6**”.

1.2 Rumusan Masalah

Financial Deepening menggambarkan penggunaan sektor keuangan disetiap negara. Di kawasan ASEAN sektor keuangan terus mengalami perkembangan. Hal ini dapat dilihat dari indikator keuangan masing-masing negara seperti jumlah uang beredar terhadap PDB, keterbukaan perdagangan terhadap PDB, tingkat inflasi, dan tingkat suku bunga riil. Peningkatan pertumbuhan ekonomi akan diringi dengan peningkatan pendalaman sektor keuangan di suatu negara.

Akan tetapi sejak terjadi krisis global pada tahun 2008, *Financial Deepening* beberapa negara di kawasan ASEAN mengalami penurunan. Indonesia sebagai salah satu negara yang ada di ASEAN mengalami penurunan persentase rasio jumlah uang beredar luas terhadap PDB pada tahun 2008 – 2010, dan meningkat kembali pada tahun berikutnya. Nilai PDB Indonesia berada diatas negara-negara di kawasan ASEAN, meskipun demikian persentase rasio jumlah uang beredar luas terhadap PDB Indonesia pada tahun 2021-2023 masih berada dibawah 50%, hal ini menunjukkan bahwa pendalaman keuangan Indonesia masih rendah jika

dibandingkan negara-negara di kawasan ASEAN. Singapura menjadi negara dengan rata-rata persentase rasio jumlah uang beredar luas terhadap PDB tertinggi di Kawasan ASEAN diikuti oleh negara Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Hal ini menyatakan bahwa adanya pola variasi yang berbeda dari tiap negara tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, penulis membatasi penelitian ini pada enam negara di Kawasan ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam maka didapatkan rumusan masalah yang akan diteliti pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perkembangan Produk Domestik Bruto (PDB), keterbukaan perdagangan (Rasio ekspor impor/PDB), tingkat inflasi (y-o-y), dan tingkat suku bunga rill di ASEAN 6 selama periode 1999-2023?
2. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB), keterbukaan perdagangan (Rasio ekspor impor/PDB), tingkat inflasi (y-o-y), dan tingkat suku bunga rill terhadap pendalaman keuangan (Rasio jumlah uang beredar/PDB) di ASEAN 6 selama periode 1999-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis kondisi Produk Domestik Bruto (PDB), keterbukaan perdagangan (Rasio ekspor impor/PDB), tingkat inflasi (y-o-y), dan tingkat suku bunga rill di ASEAN 6 selama periode 1999-2023.
2. Untuk menganalisis pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB), keterbukaan perdagangan (Rasio ekspor impor/PDB), tingkat inflasi (y-o-y), dan tingkat suku bunga rill terhadap pendalaman keuangan (Rasio jumlah uang beredar/PDB) di ASEAN 6 selama periode 1999-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Akademisi

Agar hasil yang diharapkan dapat lebih ditingkatkan, maka penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan acuan dan bahan tambahan dalam melakukan penelitian dengan topik bahasan yang sama pada ruang lingkup yang berbeda dengan cara mengubah informasi penelitian.

2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi para akademisi dan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong pembangunan nasional.